

Jurnal Kemuhammadiyahan dan Integrasi Ilmu

KONSISTENSI MUHAMMADIYAH DALAM Mendukung KEMERDEKAAN PALESTINA

Ahmad Ashim Muttaqin¹⁾ *

¹⁾Studi Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jalan Ir. Soekarno No 34 Dadaprejo Kota Batu, 65233

[*masaqin@gmail.com](mailto:masaqin@gmail.com)

ABSTRAK

Perjuangan Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dari Israel adalah tema penelitian yang sering dikaji oleh peneliti pada umumnya. Adapun dalam penelitian ini, penulis mengkaji apa yang menjadi motif Muhammadiyah mendukung kemerdekaan Palestina, serta bagaimana konsistensi Muhammadiyah dalam mewujudkan upaya tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tanfidz Muktamar dan keputusan resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedangkan sumber data sekunder adalah literatur yang terkait dengan perjuangan Muhammadiyah mendukung kemerdekaan Palestina. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa motif Muhammadiyah mendukung kemerdekaan Palestina adalah implementasi gerakan pencerahan sebagai praksis Islam berkemajuan serta komitmen Muhammadiyah terhadap konstitusi negara Indonesia. Bentuk konsistensi Muhammadiyah diwujudkan dalam lahirnya keputusan tentang perjuangan kemerdekaan Palestina di forum Muktamar, keluarnya sikap resmi organisasi, keterlibatan tokoh-tokoh Muhammadiyah, pemberian bantuan serta dorongan kepada aktor-aktor lain untuk turut mendukung kemerdekaan Palestina.

Kata kunci: Muhammadiyah, Kemerdekaan, Palestina

PENDAHULUAN

Negara merupakan organisasi tertinggi di dalam suatu masyarakat yang memiliki tujuan hidup bersama dalam suatu daerah dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Ketentuan tentang negara yang merdeka dan berdaulat mengacu pada Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara yang menjelaskan persyaratan akan berdirinya suatu negara, yakni penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, pemerintahan, serta memiliki kemampuan guna menjalin hubungan dengan negara lainnya..

Dengan begitu kemerdekaan bagi sebuah negara merupakan hal yang sangat fundamental. Negara yang memiliki kemerdekaan maka secara tidak langsung ia juga memiliki kedaulatan. Oleh sebab itu kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan menjadi hak asasi setiap manusia di dunia. Saat ini, salah satu negara yang belum mendapatkan kemerdekaan ialah Palestina. Negara yang berlokasi di kawasan Timur Tengah ini hingga kini senantiasa berjuang memperoleh kemerdekaan dan mempertahankan diri dari agresi Israel.

Awal mula penjajahan Israel atas Palestina tatkala Inggris berhasil mengambil wilayah Palestina dari kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1917. Pemandahan kekuasaan ini menjadi peluang bagi kaum Yahudi sebab mereka menginginkan

wilayah Palestina sebagai tanah air yang bernama Israel (Nurjannah & Fakhrudin, 2019). Lemahnya Inggris dalam mengelola wilayah Palestina mendorong kaum Yahudi untuk segera memproklamasikan terbentuknya negara Israel pada tahun 1948 di wilayah Palestina.

Meski begitu, rakyat Palestina tetap ingin mempertahankan wilayahnya dan memperoleh kemerdekaan. Upaya-upaya tersebut dapat diketahui dengan munculnya gerakan dan organisasi sebagai wadah perjuangan seperti Fatah, Hamas dan Palestin Liberation Organisation (Muchsini, 2015). Negara-negara Timur Tengah, negara Islam dan berbagai organisasi internasional juga mendukung upaya tercapainya kemerdekaan Palestina melalui berbagai jalan, namun upaya tersebut juga belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Bahkan upaya negara-negara Timur Tengah yang memerangi Israel justru semakin memperluas wilayah Israel di atas tanah Palestina. Meski begitu, terdapat berbagai kesepakatan yang berupaya menemukan titik temu penjajahan Israel atas Palestina, di antaranya adalah Kesepakatan Oslo II di tahun 1995, Way River di tahun 1998, Camp David II di tahun 2000 dan Arab Initiative Peace and Road Map (Aslamiah, 2015). Hanya saja kebanyakan dari kesepakatan tersebut justru lebih banyak menguntungkan Israel dan tidak berujung pada kemerdekaan penuh bagi Palestina.

Atas dasar keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina dan memperjelas kemerdekaan, ketua PLO Yasser Arafat mendeklarasikan berdirinya negara Palestina pada tahun 1988 di Aljiria, Aljazair. Dalam deklarasi tersebut, ditetapkan bahwa Yerusalem Timur sebagai ibukota negara. Jika

ditinjau dari segi hukum internasional, eksistensi Palestina tergolong rapuh sebab status kewilayahan yang belum pasti serta tidak semua negara anggota Dewan Keamanan PBB mengakui keberadaan negara Palestina (Kaslam, 2021). Bahkan sampai hari ini, Israel masih tetap punya kuasa untuk mengontrol wilayah Palestina, seperti dibangunnya pemukiman Yahudi, serta penyerangan-penyerangan terhadap warga sipil Palestina.

Perjuangan panjang Palestina dalam meraih kemerdekaan juga menjadi perhatian besar Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi keagamaan berbasis Islam terbesar di Indonesia. Organisasi yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 ini bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial sebagai bentuk implementasi dakwah. Selain itu, Muhammadiyah juga berperan aktif dalam menyikapi isu-isu internasional sesuai dengan prinsip yang termaktub dalam ajaran Islam seperti membantu perjuangan Palestina dalam memperoleh kemerdekaan.

Muhammadiyah sendiri menegaskan, perjuangan kemerdekaan Palestina merupakan upaya pengamalan nilai-nilai konstitusi yang terkandung dalam sistem kenegaraan Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir, bahwa perjuangan kemerdekaan Palestina pada dasarnya sejalan dengan cita-cita bangsa dan amanat pembukaan UUD 1945, yakni kemerdekaan adalah hak segala bangsa serta penjajahan di atas dunia harus dihapuskan (Medistiara, 2021). Atas dasar tersebut Muhammadiyah senantiasa konsisten mengupayakan tercapainya kemerdekaan bagi Palestina.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yakni analisis kepustakaan sebagai metode pengumpulan data dengan

cara membaca literatur-literatur yang mengkaji masalah tertentu serta pandangan peneliti lain yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan menggunakan dua sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Tanfidz Mukhtar Muhammadiyah dan keputusan resmi PP Muhammadiyah, adapun sumber data sekunder adalah literatur yang terkait dengan perjuangan Muhammadiyah mendukung kemerdekaan Palestina.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai organisasi dan gerakan Islam, Muhammadiyah meyakini bahwa Islam adalah agama yang berkemajuan dan mencerahkan (*din at-tanwir*). Islam berkemajuan dalam pandangan Muhammadiyah memiliki lima karakteristik, yakni *al-Mabni 'ala al-Tauhid, al-Ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah, Ihya' al-Ijtihad wa al-Tajdid, Tanmiyat al-Wasathiyah, dan Tahqiq al-Rahmah li al-'Alamin* (Muhammadiyah, 2023c). Begitupun Islam sebagai agama yang mencerahkan karena membawa tugas penting guna menyelamatkan dan membebaskan manusia dari setiap jenis kemungkaran menuju pada hidayah Allah yang terang benderang.

Melalui gerakan pencerahan, Muhammadiyah senantiasa mengamalkan tugas dakwah dan tajdid guna menampilkan Islam sebagai ajaran yang mengembangkan sikap wasathan, mewujudkan kedamaian, menghormati keberagaman dan harkat martabat manusia tanpa memandang jenis kelamin, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengutamakan akhlakul karimah, serta memajukan kehidupan umat manusia (Nashir, 2017). Komitmen ini kemudian diperjelas

dalam rumusan *Zhawâhir Al-Afkâr Al-Muhammadiyah Li Al-Qarni Al-Tsâni* (Muhammadiyah, 2010) sebagaimana berikut:

“Gerakan pencerahan (tanwir) merupakan praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan dan memajukan kehidupan. Gerakan pencerahan dihadirkan untuk memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan berupa kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan persoalan-persoalan lainnya yang bercorak struktural dan kultural. Gerakan pencerahan menampilkan Islam untuk menjawab masalah kekeringan ruhani, krisis moral, kekerasan, terorisme, konflik, korupsi, kerusakan ekologis, dan bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan.”

Seiring berkembangnya zaman, Muhammadiyah kian didorong untuk memainkan perannya tidak hanya pada level lokal, melainkan juga pada level global. Sebab Muhammadiyah mempunyai fungsi mulia untuk turut berperan aktif dalam membangun harmoni kehidupan dunia yang adil, sejahtera dan damai. Terlebih kehidupan masyarakat masih dibelenggu oleh berbagai permasalahan yang memerlukan pencerahan. Dengan demikian kondisi global yang kian memprihatinkan memerlukan pencerahan menuju keadaban. Sehingga perampasan kemerdekaan Palestina oleh Israel, ataupun kekerasan dan peperangan lainnya seharusnya tidak terjadi di zaman yang semakin maju dan berkeadaban.

Kosmopolitanisme Menuju Internasionalisasi Muhammadiyah

Dalam kerangka kemanusiaan global, Muhammadiyah merumuskan paradigma keislaman yang bersifat kosmopolitan. Kosmopolitanisme ialah kesadaran mengenai kesatuan warga dunia tanpa memandang etnis, golongan, agama, serta ras. Secara moral, kosmopolitanisme menumbuhkan adanya perasaan solidaritas dan tanggung jawab

terhadap semua manusia tanpa memandang memandang perbedaan jarak dan kebangsaan.

Secara historis, kosmopolitanisme Muhammadiyah bisa dilihat dari pendirian PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) yang menolong setiap masyarakat yang membutuhkan tanpa melihat keyakinan agamanya (Bachtiar dkk., 2020). Dengan begitu cukup jelas bahwa kosmopolitanisme tidak hanya paradigma yang mampu menegaskan akan pentingnya konsep kewarganegaraan dunia, melainkan juga bagian dari metode dakwah dalam tingkatan global yang penuh dengan persaingan.

Oleh sebab itu Muhammadiyah selaku elemen dari warga dunia diharuskan mendakwahkan gerakan pencerahan guna terbentuknya paradigma kemanusiaan universal yang mengutamakan kedamaian, toleransi, keberagaman, kebermanfaatn dan nilai-nilai yang luhur. Terlebih di era globalisasi yang nyaris tanpa sekat, Muhammadiyah menegaskan diri tidak akan menjadi objek globalisasi, melainkan menjadi subjek aktif yang menentukan melalui ekspansi organisasi dengan internasionalisasi Muhammadiyah (Nashir, 2019). Dengan demikian, Muhammadiyah dinantikan dapat mewarnai tata kehidupan dunia sebagaimana tujuan hadirnya risalah Islam untuk *rahmatan lil alamin*.

Internasionalisasi Muhammadiyah adalah jawaban atas komitmen Muhammadiyah sebagai bagian dari warga dunia untuk turut berperan aktif meneruskan gerakan pencerahan dan menghadirkan Islam dalam paradigma kosmopolitan. Dengan begitu kebermanfaatn Islam akan membawa perubahan dan perbaikan peradaban, kesejahteraan bersama, serta menciptakan solidaritas kemanusiaan dan perdamaian.

Hilman Latief menjabarkan terdapat tiga konsep internasionalisasi Muhammadiyah, yakni internasionalisasi gagasan, internasionalisasi peran, dan internasionalisasi gerakan (Masmuh, 2020). Langkah internasionalisasi sekurang-kurangnya telah dilakukan dalam bentuk pendirian Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) beserta amal usaha, penguatan forum dialog dan diskusi, serta pemberian bantuan kemanusiaan (Temarwut, 2023).

Salah satu isu global yang menjadi perhatian Muhammadiyah adalah perjuangan Palestina dalam memperoleh haknya, yakni kemerdekaan. Penjajahan Israel atas Palestina yang telah terjadi berpuluh-puluh tahun hingga saat ini belum menemukan titik terang yang jelas. Selain karena kompleksitas penjajahan yang terjadi, keterlibatan pihak-pihak lain juga turut melanggengkan penindasan kepada rakyat Palestina. Pada pembahasan berikutnya akan dipaparkan upaya Muhammadiyah dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Perjuangan Muhammadiyah Mendukung Kemerdekaan Palestina

Berdasarkan sejarah, salah satu tokoh Muhammadiyah yang getol memperjuangkan kemerdekaan Palestina adalah Abdul Kahar Mudzakkir. Hal ini karena Kahar Mudzakkir pernah menempuh pendidikan di Mesir dan menjalin relasi cukup baik dengan ulama Palestina (Mudore, 2019). Maka pada tahun 1937, Kahar Mudzakkir membawa mandat dari Muhammadiyah dan 33 organisasi lain di Indonesia untuk menghadiri Konferensi Bloudan di Syria guna menyerukan aksi pembebasan Palestina (Mu'arif, 2023).

Adapun jika dilacak melalui dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah, terkhusus di dalam Tanfidz Muktamar, keputusan mengenai perjuangan Palestina pertama kali tercatat pada Tanfidz Muktamar ke 37 pada tahun 1969. Di

dalam permusyawaratan tertinggi tersebut diputuskan pernyataan dan usaha yang esensinya berupa mengutuk atas agresi Israel terhadap Palestina beserta wilayah Arab lainnya, menyerukan agar anggota Muhammadiyah dan muslim Indonesia untuk mendukung perjuangan Palestina dan negara Arab lainnya serta membebaskan daerah yang di invasi Israel, mengutuk dan melarang penghancuran Masjid Al-Aqsha dan tempat suci, serta mendorong pemerintah Indonesia supaya proaktif dan bertindak nyata membantu perjuangan Palestina dan Arab (Badawi, 2007).

Keputusan tersebut merupakan respon terhadap tindakan Israel yang menyerang Palestina dan negara Arab dalam Perang Enam Hari dan berhasil menganeksasi wilayah Tepi Barat, Dataran Tinggi Golan, Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai. Di antara tahun 1960 sampai 1970-an tokoh Muhammadiyah yang sangat getol memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum internasional adalah Lukman Harun. Atas kegigihannya tersebut, ia diberikan amanah sebagai Ketua Panitia Pembebasan Palestina dan Masjidil Aqsha hingga menjadi Sekretaris Jenderal Asian Conference on Religion and Peace (Muhammadiyah, 2021b).

Pada Muktamar Muhammadiyah ke 38 tahun 1971, situasi Palestina masuk dalam salah satu pembahasan Muktamar dan menghasilkan resolusi berupa:

“Menyatakan ukhuwah Islamiyah yang disertai dengan keprihatinan sedalam-dalamnya serta berdo`a semoga atas pertolongan Allah SWT pihak-pihak yang berkepentingan dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan dengan jalan yang menjamin keselamatan Agama dan umat Islam”.

Forum Muktamar juga mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah supaya bertindak seperlunya dalam merealisasikan resolusi diatas serta mengupayakan pertolongan sosial untuk meringankan beban korban. Rentang tahun 1968 sampai 1971 memang fase yang cukup sulit bagi rakyat Palestina. Selain karena agresi Israel, perang saudara dengan pasukan Yordania menyebabkan ribuan korban jiwa melayang. Di tahun 1969 juga terjadi insiden pembakaran Masjid Al-Aqsha yang secara perlahan memantik kesadaran negara-negara Islam untuk turut membantu perjuangan Palestina (Arif, 2015). Kesadaran ini kemudian diwujudkan dengan pembentukan Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Begitupun dalam Muktamar Muhammadiyah ke 40 di tahun 1978 yang menegaskan bahwa Muhammadiyah mendukung seutuhnya kerja keras rakyat Palestina dan Arab untuk mendapatkan hak atas tanah airnya yang di invasi Israel. Muhammadiyah juga mengancam politik expansionisme Israel dan Zionisme serta menyerukan terhadap semua negara-negara Arab agar semakin memperteguh kerja sama dan kesatuan frame upaya yang didasarkan semangat persatuan Arab dan Islam.

Keputusan tersebut diteguhkan kembali pada Muktamar Muhammadiyah ke 41 tahun 1985 dengan menyerukan negara-negara Islam untuk meningkatkan upaya-upaya yang lebih nyata demi terwujudnya hak rakyat Palestina atas tanah air mereka secara berdaulat dan merdeka, serta menuntut agar Masjid Al-Asha dan Yerusalem dikembalikan ke dalam kekuasaan Arab.

Pada tahun 1987 mulai muncul gerakan intifada pertama yang berlangsung hingga tahun 1993 dan berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Oslo (Khumairoh & Fadhil, 2019). Gerakan intifada pertama ini merenggut ribuan korban jiwa serta merusak sebagian pemukiman warga Palestina. Kejadian tersebut direspon oleh

Muhammadiyah dalam Muktamar Muhammadiyah ke 42 tahun 1990 dan Muktamar Muhammadiyah ke 43 tahun 1995 yang menghasilkan keputusan mengutuk pemerintah Israel atas praktek kekerasan yang dilakukan kepada rakyat Palestina. Muhammadiyah juga mendorong PBB agar berperan aktif menyelesaikan penjajahan Israel atas Palestina serta menciptakan perdamaian disana.

Gerakan intifada kedua kembali bergulir pada tahun 2000 karena masyarakat Palestina berupaya mempertahankan masjid al-Aqsha pasca kedatangan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon (Rachmawati dkk., 2022). Muktamar Muhammadiyah ke 44 yang berlangsung di tahun yang sama mendorong pemerintah untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah Palestina secara adil dan bermartabat. Begitupun Muktamar Muhammadiyah ke 45 tahun 2005 yang mendesak pemerintah supaya menggalang solidaritas global untuk mempertahankan hak-hak rakyat Palestina demi terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat serta terlepas dari segala bentuk penjajahan Israel.

Dorongan tersebut kemudian diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dengan menyelenggarakan New Asia Africa Partnership on Capacity Building for Palestine dan pembentukan Indonesia-Palestine Friendship Initiative. Sebagaimana diungkapkan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin (Media, 2008), bahwa upaya tersebut merupakan bukti konkrit pemerintah Indonesia mendorong perdamaian antara Israel dan Palestina.

Masyarakat Palestina, terlebih yang tinggal di Jalur Gaza, mengalami penindasan dengan diblokade nya area tersebut dari dunia

luar. Bantuan kemanusiaan pada akhirnya tidak bisa masuk untuk membantu masyarakat Palestina. Bahkan misi kemanusiaan melalui kapal MV Mavi Marmara mengalami bentrokan dengan pasukan Israel dan menimbulkan beberapa korban jiwa. Atas kejadian tersebut, Din Syamsuddin menyatakan bahwa tindakan Israel adalah sebuah kejahatan kemanusiaan dan terorisme nyata (Suryanto, 2010). Din Syamsuddin juga menambahkan bahwa Muhammadiyah telah menggalang solidaritas lintas agama dengan mengirim bantuan tim medis ke Palestina (Media, 2010).

Adapun saat Muktamar Muhammadiyah ke 46 tahun 2010 menginventarisasi masalah-masalah di abad kedua satu. Salah satunya adalah hegemoni dan paradoks politik global, dimana banyak negara-negara maju, terkhusus Amerika Serikat yang menerapkan standar ganda, yakni mendukung demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia, namun disisi lain tutup mata atas tindakan Israel yang menjajah Palestina. Analisa tersebut terbukti ketika Amerika Serikat memveto Palestina yang berniat masuk sebagai anggota PBB. Atas hal tersebut, Muhammadiyah menyesalkan sikap Amerika Serikat dan berharap pemerintah Indonesia konsisten dan konsekuen dalam memperjuangkan hak-hak Palestina di dunia internasional (Burhani, 2011).

Langkah nyata Muhammadiyah dalam membantu masyarakat Palestina kembali dibuktikan dengan menyalurkan bantuan sebesar Rp. 2,5 miliar pada tahun 2014 (Media, 2014). Bantuan ini merupakan hasil sumbangan organisasi serta lembaga-lembaga di bawah naungan PP Muhammadiyah yang dikumpulkan dan disalurkan melalui rekening Perdana Menteri Palestina. Di tahun 2017 bentrokan antara pasukan Israel dan masyarakat Palestina kembali terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsha.

Atas kejadian tersebut Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap nomor

340/PER/I.0/J/2017 yang berisi lima poin, pertama ungkapan prihatin atas kejadian di Palestina serta mengutuk keras tindakan tentara Israel yang tidak berperilaku kemanusiaan. Kedua mendesak PBB, OKI dan Liga Arab untuk berperanan aktif. Ketiga mendesak negara-negara di dunia untuk berperanan dalam mengurangi eskalasi konflik. Keempat mendorong pemerintah Indonesia untuk turut membantu melalui langkah diplomatik. Kelima menyerukan kepada umat beragama untuk menggalang solidaritas kemanusiaan bagi masyarakat Palestina.

Hiruk pikuk penjajahan Israel atas Palestina semakin menyeruak ke publik tatkala Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana membuka kedutaan di Yerusalem. Tentu rencana ini mendapatkan reaksi keras dari kalangan umat Islam. Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir secara tegas menyatakan bahwa *“Donald Trump secara sadar membuka kotak pandora konflik Palestina-Israel,”* (Syada & Ribas, 2017). Haedar Nashir juga menekankan semestinya Dewan Keamanan PBB memberikan pandangan agar langkah tersebut tidak dilakukan.

Bentrokan berdarah kembali terjadi di kompleks masjid Al-Aqsa pada tahun 2021. Menanggapi tragedi tersebut, PP Muhammadiyah mengungkapkan kecaman dan perasaan prihatin yang begitu dalam. Muhammadiyah juga mendorong PBB serta semua negara yang mendukung kemerdekaan abadi supaya bersikap tegas terhadap segala bentuk penjajahan Israel, termasuk di dalamnya tidak membela atas apa yang telah dilakukan oleh Israel. Lebih lanjut Haedar Nashir (Muhammadiyah, 2021a) menegaskan:

“Kami Muhammadiyah dan rakyat Indonesia senantiasa terus membela dan mendukung perjuangan rakyat Palestina demi tegaknya kedaulatan negara Palestina yang bebas dari segala bentuk kesewenang-wenangan Israel. Dunia modern semestinya menciptakan kemerdekaan dan perdamaian abadi untuk semua bangsa di muka bumi demi terciptanya peradaban umat manusia yang hidup bersama secara bermartabat dan berdaulat,”

Di tahun yang sama, Muhammadiyah mengumumkan bahwa berhasil menggalang dana sebesar Rp. 32.185 miliar sebagai wujud konsistensi Muhammadiyah beserta unsur penggerakannya untuk mendukung kemerdekaan Palestina (Muhammadiyah, 2021c). Muhammadiyah meyakini bahwa bantuan konkrit, tidak kalah penting dari pernyataan resmi untuk mendukung kemerdekaan, kesejahteraan, dan kehidupan layak bagi rakyat Palestina (Muhammadiyah, 2023a). Di tahun 2023 Muhammadiyah juga menyalurkan bantuan sebesar Rp.13 miliar untuk masyarakat Palestina (Muhammadiyah, 2023a).

Penyerangan masyarakat Palestina di masjid Al-Aqsa kembali terjadi di tahun 2022. Haedar Nashir menyesalkan negara dan lembaga yang selama ini berada di garda terdepan ketika membahas hak asasi manusia dan mendukung perdamaian nyaris bisu terhadap penjajahan Israel ke masyarakat Palestina (Muhammadiyah, 2022a). Kondisi seperti inilah yang dibaca Muhammadiyah sebagai hegemoni politik global yang menerapkan standar ganda.

Pada Tanfidz Muktamar Muhammadiyah ke 48 tahun 2022 menerangkan bahwa Muhammadiyah merupakan bagian dari diplomasi perdamaian dunia. Peran ini tidak saja dijalankan pada forum-forum internasional, melainkan juga terlibat langsung dalam penanganan masalah kemanusiaan dan penyelesaian konflik di berbagai

negara, termasuk Palestina. Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

“Berbagai kiprah tersebut tidak lepas dari prinsip Muhammadiyah untuk senantiasa bergerak bagi terwujudnya Islam sebagai rahmat bagi semesta alam melalui perjuangan untuk menciptakan perdamaian global.”

Dalam rangka menegaskan wujud peran aktif Muhammadiyah di kancah internasional, Muhammadiyah membentuk Muhammadiyah Aid, sebuah badan kemanusiaan guna menghimpun dan menyalurkan usaha kolaboratif di level internasional. Melalui badan ini, Muhammadiyah mengalirkan bantuan berupa alat medis, bahan kebutuhan pokok, serta membangun sekolah bagi rakyat Palestina.

Program pendidikan bagi masyarakat Palestina dilakukan Muhammadiyah melalui Lazismu dan telah berlangsung sejak tahun 2018 (Muhammadiyah, 2023b). Program ini diimplementasikan dalam bentuk beasiswa bagi pelajar Palestina yang ingin melanjutkan studi di Indonesia maupun di luar negeri. Muhammadiyah juga membangun dua sekolah di Beirut yang ditujukan bagi pengungsi Palestina (Muhammadiyah, 2021d).

Muhammadiyah secara konsisten mendukung supaya Palestina mendapatkan kemerdekaan dan lepas dari penjajahan Israel, serta mendukung negara-negara lain yang belum mendapatkan kemerdekaan penuh. Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menerangkan bahwa dukungan Muhammadiyah merupakan komitmen terhadap konstitusi Indonesia, yaitu sikap anti penjajahan dan anti kolonialisme sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Media, 2022).

Penegasan komitmen Muhammadiyah terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina kembali diutarakan saat menerima kunjungan Duta Besar Palestina Zuhair Al-Shun. Muhammadiyah bersama Indonesia tidak akan berhenti mendukung Palestina agar memperoleh kemerdekaan di atas tanah airnya sendiri (Muhammadiyah, 2022b). Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center Rahmawati Husen saat Gala Dinner bersama Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh.

Peperangan antara Israel dan Palestina kembali meletus pada tahun 2023. Atas kejadian tersebut, Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan pers bernomor 006/PER/1.0/I/2023 yang berisi tujuh poin berupa, keprihatinan atas banyaknya korban jiwa, mendesak DK PBB untuk mengambil langkah guna menghentikan perang, mengingatkan agar Israel tidak memanfaatkan perang tersebut untuk memperluas wilayah, mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih proaktif, menghimbau kepada rakyat Indonesia untuk bersikap arif dalam menerima informasi, menghimbau umat Muslim untuk melaksanakan sholat ghaib, serta menegaskan bahwa Muhammadiyah senantiasa mendukung perjuangan Palestina.

Muhammadiyah melalui Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) juga menerbitkan pernyataan pers atas berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OKI dan Liga Arab yang membahas agresi Israel di wilayah Palestina. Pernyataan pers tersebut berisi apresiasi terhadap upaya OKI dan Liga Arab yang melaksanakan KTT, ucapan syukur atas keputusan bersama, dorongan gencatan senjata guna menyalurkan bantuan kemanusiaan, penegasan kecaman terhadap standar ganda, dorongan agar Israel mendapatkan proses hukum, dukungan terhadap langkah pemerintah Indonesia untuk memulai proses perdamaian.

SIMPULAN

Muhammadiyah sebagai organisasi dan gerakan Islam meyakini bahwa Islam merupakan agama yang berkemajuan dan mencerahkan. Keyakinan ini meniscayakan Muhammadiyah untuk senantiasa tanggap dan berperan aktif seiring berkembangnya zaman. Di dalam level global, internasionalisasi Muhammadiyah merupakan bentuk tanggung jawab Muhammadiyah sebagai bagian dari komunitas global untuk turut menjadi gerakan yang memberi pencerahan dan menampilkan Islam sebagai agama kosmopolitan.

Perjuangan kemerdekaan Palestina adalah salah satu isu global yang menjadi perhatian Muhammadiyah. Sikap tersebut setidaknya memiliki dua motif, pertama merupakan implementasi gerakan pencerahan sebagai praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan, memajukan kehidupan serta memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan. Kedua sebagai bentuk komitmen Muhammadiyah terhadap konstitusi Indonesia, yakni amanat anti penjajahan dan anti kolonialisme sebagaimana tertulis dalam pembukaan UUD 1945.

Adapun konsistensi Muhammadiyah dalam mendukung kemerdekaan Palestina bisa dilihat dalam lima aspek. Pertama, lahirnya keputusan tentang upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina di hampir setiap perhelatan Muktamar Muhammadiyah sejak tahun 1969. Kedua, ketegasan sikap Muhammadiyah di setiap momen krusial yang merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina. Ketiga, keterlibatan tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam forum-forum internasional guna mencari titik temu penjajahan Israel-Palestina. Keempat, pemberian bantuan terhadap masyarakat

Palestina, baik dalam bentuk uang tunai, fasilitas kesehatan hingga pendidikan. Kelima, dorongan Muhammadiyah agar pemerintah Indonesia, PBB serta aktor-aktor lain untuk berperan aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

REFERENSI

- Arif, M. Q. A. (2015). Kemandulan Rezim Organisasi Kerjasama Islam dalam Perlindungan terhadap Al-Aqsa. *Jurnal Review Politik*, 05(01). <https://doi.org/10.15642/jrp.2015.5.1.46-59>
- Aslamiah, S. (2015). Diplomasi Indonesia dalam Mendukung Palestina menjadi Negara Peninjau di PBB Tahun 2012. *Jom FISIP*, 2(2). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/7523>
- Bachtiar, H., Nurhakim, Moh., & Fadly, H. (2020). Visi Kosmopolitanisme Islam Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah. *Jurnal Muhammadiyah Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.22219/jms.v1i1.11414>
- Badawi, Mh. D. (2007). *95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah Himpunan Keputusan Muktamar*. LPI PP Muhammadiyah.
- Burhani, R. (2011, September 22). *Muhammadiyah sesalkan hak veto AS bagi Palestina*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/276619/muhammadiyah-sesalkan-hak-veto-as-bagi-palestina>
- Kaslam, K. (2021). Dampak Aneksasi Israel Terhadap Eksistensi Negara Palestina (Tinjauan Geografi Politik). *Review of International Relations*, 3(2). <https://doi.org/doi.org/10.24252/rir.v3i2.23527>
- Khumairoh, M. I., & Fadhil, A. (2019). Gerakan Intifadhah dan Kemunculan Hamas (1987-

- 1993). *Periode: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 1(1). <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/periode/article/view/10478>
- Masmuh, A. (2020). Peran Muhammadiyah dalam Membangun Peradaban Dunia. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 15(1), 78–93. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v15i1.107>
- Media, K. C. (2008, Juli 15). *Din Syamsudin: Dorong Berdirinya Negara Palestina*. KOMPAS.com. <https://regional.kompas.com/read/2008/07/15/18014010/~Nasional>
- Media, K. C. (2010, Juni 3). *Palestina Korban Kejahatan Kemanusiaan*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2010/06/03/15523829/~Nasional>
- Media, K. C. (2014, September 9). *PP Muhammadiyah Bantu Rp 2,5 Miliar untuk Palestina*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/xml/2014/09/09/16132741/PP.Muhammadiyah.Bantu.Rp.2.5.Miliar.untuk.Palestina>
- Media, K. C. (2022). *PP Muhammadiyah Serukan Dukungan bagi Palestina, Ingatkan Semangat Antikolonialisme UUD 1945*. KOMPAS.tv. <https://www.kompas.tv/nasional/256530/pp-muhammadiyah-serukan-dukungan-bagi-palestina-ingatkan-semangat-antikolonialisme-uud-1945>
- Medistiara, Y. (2021). *Ketum PP Muhammadiyah: Bela Palestina Sama dengan Tegakkan Konstitusi*. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5579521/ketum-pp-muhammadiyah-bela-palestina-sama-dengan-tegakkan-konstitusi>
- Mu'arif, M. (2023, Oktober 20). *Abdul Kahar Muzakkir dan Diplomasi Muhammadiyah untuk Palestina*. Suara Muhammadiyah. <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/abdul-kahar-muzakkir-dan-diplomasi-muhammadiyah-untuk-palestina>
- Muchsin, M. A. (2015). Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 39(2). <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i2.32>
- Mudore, S. B. (2019). Peran Diplomasi Indonesia dalam Konflik Israel-Palestina. *Jurnal CMES*, 12(2), 170. <https://doi.org/10.20961/cmcs.12.2.37891>
- Muhammadiyah. (2021a, Mei 9). *Hentikan Kekerasan dan Pengusiran Terhadap Rakyat Palestina*. Muhammadiyah. <https://muhammadiyah.or.id/2021/05/hentikan-kekerasan-dan-pengusiran-terhadap-rakyat-palestina/>
- Muhammadiyah. (2021b, Mei 30). *Totalitas Mendukung, Muhammadiyah Pernah Tanggung Biaya Operasional Kedutaan Palestina*. Muhammadiyah. <https://muhammadiyah.or.id/2021/05/totalitas-mendukung-muhammadiyah-pernah-tanggung-biaya-operasional-kedutaan-palestina/>
- Muhammadiyah. (2021c, Juni 5). *Muhammadiyah Himpun 32 Milyar Lebih untuk Palestina*. Muhammadiyah. <https://muhammadiyah.or.id/2021/06/muhammadiyah-himpun-32-milyar-lebih-untuk-palestina/>
- Muhammadiyah. (2021d, Agustus 2). *Lagi, Muhammadiyah Akan Bangun Sekolah Kedua untuk Pengungsi Palestina di Lebanon*. Muhammadiyah.

- <https://muhammadiyah.or.id/2021/08/lagi-muhammadiyah-akan-bangun-sekolah-kedua-untuk-pengungsi-palestina-di-lebanon/>
- Muhammadiyah. (2022a, April 17). *Haedar Menyebut Dunia Nyaris Bisu Terhadap Serangan yang Dilakukan Israel*. Muhammadiyah. <https://muhammadiyah.or.id/2022/04/haedar-menyebut-dunia-nyaris-bisu-terhadap-serangan-yang-dilakukan-israel/>
- Muhammadiyah. (2022b, Juli 15). *Terima Silaturahmi Dubes Palestina, Haedar: Muhammadiyah Tidak Akan Surut Mendukung Palestina Merdeka*. Muhammadiyah. <https://muhammadiyah.or.id/2022/07/terima-silaturahmi-dubes-palestina-haedar-muhammadiyah-tidak-akan-surut-mendukung-palestina-merdeka/>
- Muhammadiyah. (2023a, November 1). *Bantuan Muhammadiyah untuk Rakyat Palestina Konkret Tidak Sekadar Wacana*. Muhammadiyah. <https://muhammadiyah.or.id/2023/11/bantuan-muhammadiyah-untuk-rakyat-palestina-konkret-tidak-sekadar-wacana/>
- Muhammadiyah. (2023b, November 9). *Perhatikan SDM Rakyat Palestina, Muhammadiyah Berikan Beasiswa Khusus Pendidikan Tinggi Sejak 2018 Sampai Sekarang*. Muhammadiyah. <https://muhammadiyah.or.id/2023/11/perhatikan-sdm-rakyat-palestina-muhammadiyah-berikan-beasiswa-khusus-pendidikan-tinggi-sejak-2018-sampai-sekarang/>
- Muhammadiyah, P. P. (2010). *Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua*. Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Muhammadiyah, P. P. (2023c). *Risalah Islam Berkemajuan*. Gramasurya.
- Nashir, H. (2017). *Islam Agama Pencerahan*. Suara Muhammadiyah.
- Nashir, H. (2019). *Kuliah Kemuhammadiyah 2*. Suara Muhammadiyah.
- Nurjannah, E. P., & Fakhruddin, M. (2019). Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina. *Periode: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 1(1). <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/periode/article/view/10479>
- Rachmawati, T., Karisma, G., & Mumtaz, S. (2022). Keterlibatan Perempuan dalam Perang, Politik dan Non-Politik Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus: Perlawanan Perempuan Palestina terhadap Okupasi Israel Tahun 2000-2019). *POLITEA*, 5(2), 205. <https://doi.org/10.21043/politea.v5i2.13848>
- Suryanto, S. (2010, Juni 1). *Din Syamsuddin: Tindakan Israel Terorisme Nyata*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/206132/din-syamsuddin-tindakan-israel-terorisme-nyata>
- Syada, S., & Ribas, R. (2017, Desember 8). *Trump Membuka Kotak Pandora Konflik Palestina-Israel—Suara Muhammadiyah*. Suara Muhammadiyah. <https://web.suaramuhammadiyah.id/2017/12/08/trump-membuka-kotak-pandora-konflik-palestina-israel/>
- Temarwut, T. (2023). Muhammadiyah dalam Percaturan Internasional. *Journal on Education*, 5(3). <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1689>

ISSN: 3024-9139

Website: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKII/index>

Email: jkii@umj.ac.id